

## Investasi dalam Sumber Daya Bersama untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

### Pembelajaran dari Guatemala, Meksiko, Nepal dan Namibia

Sophia Gnych<sup>1</sup>, Steven Lawry<sup>1</sup>, Rebecca McLain<sup>1</sup>, Iliana Monterroso<sup>1</sup>, Anukram Adhikary<sup>2</sup>

#### Pesan Kunci

- Investasi sumber daya milik bersama (*commons*) utamanya berasal dari donor, pemerintah, dan masyarakat, namun investasi sektor swasta semakin meningkat.
- Kesiapan investasi berbasis kepemilikan bersama bergantung pada tingkat jaminan dan kepastian para pemangku kepentingan bahwa kewajiban masing-masing pihak akan dipenuhi. Kesiapan investasi berkembang dari waktu ke waktu dan secara bertahap, ketika tingkat jaminan dan kepastian meningkat.
- Masing-masing sektor memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk memitigasi risiko.
- Hak-hak masyarakat telah mendorong investasi yang mengakui karakter sosial dari kepemilikan bersama dan memunculkan pengembalian lingkungan hidup dan sosial, juga keuntungan.
- Dibutuhkan penelitian tambahan tentang asal, mekanisme, volume dan arah investasi sumber daya yang dikelola masyarakat yang dapat membantu masyarakat dan investor untuk bersama-sama memahami pilihan-pilihan mereka dengan lebih baik.

#### Pendahuluan

Masyarakat lokal dan masyarakat adat mengelola sebagian besar hutan dunia yang tersisa, padang rumput dan perikanan sebagai sumber daya yang dimiliki bersama (*common property resources*) (Wily 2018). Pelimpahan kepemilikan, hak-hak penggunaan dan eksklusivitas kepada masyarakat, dalam banyak situasi, dapat memberikan insentif bagi mereka untuk mengelola sumber daya dengan cara memfasilitasi keluaran pengelolaan berkelanjutan, dan untuk pembagian manfaat yang lebih setara (Baynes et al. 2015). Namun, pemahaman kami tentang siapa yang berinvestasi dalam sumber daya

yang dikelola masyarakat setelah berbagai hak didevolusikan dan bagaimana pola investasi berkembang dari waktu ke waktu masih terkotak-kotak. Kami menjawab kesenjangan pengetahuan ini dengan mengeksplorasi berbagai jalur yang muncul untuk mewujudkan investasi pada sumber daya yang dimiliki bersama di Guatemala, Meksiko, Nepal dan Namibia.

#### Latar Belakang

Ketika sejumlah hak dilimpahkan, masyarakat secara keseluruhan diakui sebagai pemegang hak-hak tersebut dan kelembagaan masyarakat yang baru maupun yang sudah ada diberdayakan untuk mengelola sumber daya bersama tersebut (Cronkleton et al. 2011; Ambrose-Oji et al. 2015). Ketika hak atas hutan dilimpahkan, lembaga hutan kemasyarakatan (*Community Forest Institutions/CFI*) muncul, biasanya terdiri dari kelompok-kelompok pengguna masyarakat yang melaksanakan fungsi-fungsi tata kelola hutan bersama dengan satu atau lebih bisnis-bisnis hutan kemasyarakatan (*Community Forest Enterprises/CFE*) yang dirancang untuk menangkap nilai-nilai moneter dari sumber daya bersama (Bray dan Merino 2002). CFE bergerak sebagai suatu **bisnis sosial**, yang berbeda dari bisnis-bisnis yang berorientasi profit, dimana keuntungan mereka “disimpan dalam organisasi dan/atau masyarakat baik sebagai jasa langsung atau sebagai hibah untuk suatu masyarakat tertentu” (Foundjem-Tita et al. 2019, 5). CFE dianggap sebagai suatu jenis **inovasi sosial** (Klůvánková et al. 2018), yang didefinisikan sebagai “...rekonfigurasi praktik-praktik sosial, sebagai jawaban dari berbagai tantangan dalam masyarakat, yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlu adanya keterlibatan aktor-aktor masyarakat sipil” (Polman et al. 2017, 12).

Terbatasnya modal keuangan sering membatasi pertumbuhan dan keberhasilan CFI. Konsep kesiapan investasi telah muncul sebagai alat pemandu kebijakan untuk mengurangi sejumlah penghalang dalam investasi bisnis (Mason dan Kwok 2010). **Kesiapan investasi** dipahami sebagai kemampuan pengelola CFI untuk memahami kebutuhan investor dan menjawab kebutuhan tersebut dengan memberikan informasi yang memadai dan membangun kredibilitas dan kepercayaan sehingga investor akan menyediakan pendanaan (Fellnhöfer 2015).

1 Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

2 *Forest Action*, Nepal

Dibutuhkan pengurangan risiko dan biaya transaksi dalam mewujudkan CFI yang siap investasi. Empat syarat utama untuk mengurangi risiko dan memberikan investor suatu jaminan dan kepastian yang dibutuhkan untuk berinvestasi dalam CFI: 1) hak-hak yang jelas, aman dan cukup luas (Lawry et al. 2017), 2) hubungan kepercayaan dan jaringan sosial yang kuat dalam masyarakat dan antar masyarakat serta aktor-aktor eksternal (Baynes et al. 2015), 3) aturan dan prosedur yang jelas dan ditegakkan terkait tata kelola hutan dan bisnis (Dasgupta 2005), dan 4) kapasitas teknologi, negosiasi dan pengelolaan yang memadai di kalangan masyarakat (Hewitt dan Castro Delgadillo 2009).

Berbagai investasi pemungkin, seperti sejumlah kebijakan yang mengklarifikasi hak dan mendorong transparansi serta akuntabilitas, dan program-program yang membangun kapasitas pemantauan, penegakan, administratif dan teknis, cukup dapat mengurangi risiko sehingga menarik pendanaan dari luar untuk melakukan investasi aset (Elson 2012).

"Investasi pemungkin membentuk barang publik, yang kemudian memungkinkan investasi aset menjadi aset-aset pribadi. Aset-aset pribadi ini... adalah aset yang dibentuk oleh para pemegang hak itu sendiri: dalam bentuk perusahaan, tabungan publik, infrastruktur fisik serta kesehatan dan pendidikan yang lebih baik" (Elson 2012, 27)

Organisasi masyarakat di tingkat lokal dapat membentuk perkumpulan untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam membentuk konteks regulasi yang dapat mengurangi risiko dan mendukung pendanaan untuk masyarakat (Paudel et al. 2012).

Berdasarkan konsep yang dibahas di atas, kami mengembangkan suatu teori perubahan sementara (*theory of change/TOC*) (Gambar 1) untuk memandu studi kami tentang investasi setelah devolusi hak terjadi. Teori perubahan ini memperlihatkan sebuah alur dimana pelimpahan hak-hak masyarakat dapat mengarah pada investasi serta menghasilkan dampak sosial dan lingkungan hidup. Pada tulisan ini kami mencoba mengupas 'kotak hitam' investasi yang digambarkan dalam diagram teori perubahan.

Kami meringkas analisis kami dalam tiga proposisi:

- **Proposisi 1:** Penghalang untuk investasi dalam CFI tetap dapat diatasi dan investasi terjadi setelah **devolusi** atas sejumlah hak.
- **Proposisi 2:** Kesiapan investasi CFI mempersyaratkan bahwa calon investor dan penerima investasi memiliki jaminan dan kepastian bahwa kewajiban masing-masing pihak akan dihormati. Masing-masing sektor (misalnya publik, masyarakat sipil, swasta) memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk memitigasi risiko.
- **Proposisi 3:** Devolusi hak-hak masyarakat telah mendorong investasi oleh CFI yang mendorong pengembalian lingkungan hidup dan sosial, juga keuntungan.



**Gambar 1. Teori perubahan mengaitkan devolusi hak-hak dengan investasi finansial serta keluaran lingkungan hidup dan sosial.**

## Metode

Kotak 1 – Negara dan jenis pengelolaan bersama	
Guatemala	Konsesi Hutan Masyarakat (hutan)
Meksiko	Ejidos dan masyarakat adat (hutan)
Nepal	Kelompok Masyarakat Pengguna Hutan (hutan)
Namibia	Lembaga Konservasi Satwa Liar (satwa liar)

Kami melakukan komparasi studi kasus untuk mengevaluasi pola-pola sumber investasi, mekanisme, sektor target, serta pengembalian atau manfaat yang diharapkan dan yang terealisasi di dalam dan lintas negara-negara yang termasuk dalam studi ini. Guatemala, Meksiko dan Nepal telah mendevolusikan hak-hak hutan ke masyarakat, sementara Namibia telah mendevolusikan hak-hak terkait satwa liar. Jenis-jenis pengelolaan bersama pada masing-masing negara yang diteliti dirangkum dalam Kotak 1.

## Hasil

### Sekilas tentang Pelimpahan Hak-Hak

Di **Guatemala**, kontrak konsesi masyarakat, yaitu kesepakatan legal antara negara dengan sekelompok orang yang terorganisir yang merupakan bagian dari masyarakat lokal, adalah elemen kunci dari pelimpahan hak-hak hutan. Ketentuan untuk menerapkan konsesi hutan masyarakat ditetapkan pada tahun 1994 dan dimodifikasi pada tahun 1998. Negosiasi kesepakatan perdamaian tahun 1996 menjamin hak-hak anggota masyarakat terhadap sumber daya di dalam kawasan lindung. Melalui kontrak 25 tahun, para anggota konsesi berhak untuk mengelola dan memanen hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta melaksanakan kegiatan-kegiatan ekowisata di dalam kawasan lindung. Akses masyarakat dan hak untuk bermukim, hanya diberikan dengan syarat spesies kayu bernilai tinggi telah diatur dan disertifikasi (Radachowsky et al. 2012).

Di **Meksiko**, pelimpahan hak atas lahan kepada masyarakat diawali dengan revolusi yang terjadi pada awal 1920-an (Bray dan Merino 2002). Saat ini terdapat dua jenis rezim tenurial berbasis masyarakat dan beberapa bentuk pengelolaan sumber

daya bersama – yaitu berdasarkan masyarakat adat dan *ejidos*. Pengelolaan dan rezim tenurial untuk masyarakat adat dilakukan berdasarkan pengakuan hak-hak adat, sementara *ejidos* dilakukan berdasarkan suatu bentuk tenurial yang muncul dari reformasi agraria. Sekitar separuh dari wilayah lahan Meksiko secara formal telah diakui sebagai *ejidos* atau lahan masyarakat adat, dan sekitar 9000 masyarakat memiliki hutan di atas lahan mereka (INEGI 1997). Pada tahun 2017, dilaporkan bahwa lebih dari 2134 *ejidos* dan masyarakat telah memiliki izin pengelolaan hutan (Carrillo-Anzures et al. 2017).

Pengelolaan hutan di **Nepal** berkembang secara bertahap menuju pada pengaturan berbasis masyarakat, yang mencapai puncaknya dengan adanya Undang-Undang Hutan tahun 1993, yang melegalkan berbagai bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan mengakui CFI sebagai lembaga swadaya, lembaga yang kekal dan berbadan hukum yang dapat memperoleh, memiliki, mentransfer dan mengelola properti bergerak maupun tidak bergerak. Pada tahun 2017, Nepal memiliki 22.266 hutan kemasyarakatan, yang melibatkan 2,9 juta rumah tangga dan mencakup luasan area sekitar 22,37 juta ha (Bhandari et al. 2019).

Pada tahun 1996, **Namibia** membentuk institusi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat (CBNRM). Di bawah reformasi tenurial ini, warga di wilayah komunal dapat membentuk suatu lembaga properti bersama yaitu suatu lembaga konservasi yang mengelola, menggunakan dan mengambil manfaat dari satwa liar dan sumber daya alam lain yang ada di lahan tradisional mereka (Naidoo et al. 2016). Untuk mendaftarkan sebuah lembaga konservasi, warga harus menyusun rencana pengelolaan sumber daya, mendaftar untuk keanggotaan dan membentuk komite dan konstitusi pengelolaan lembaga konservasi. Pada tahun 2017, Namibia memiliki 83 lembaga konservasi yang terdaftar yang mencakup luasan area sekitar 163.000 km<sup>2</sup> (MET/NACSO 2018).

### Investasi setelah Pelimpahan Hak

Munculnya hak-hak lokal yang lebih jelas dan kuat terhadap sumber daya setelah pelimpahan sejumlah hak dan telah mempercepat investasi publik dan swasta pada masing-masing kasus dari empat negara dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Investasi setelah pelimpahan hak.

	Guatemala	Meksiko	Nepal	Namibia
Donor	Investasi finansial substansial dimulai pada tahun 1980-an <ul style="list-style-type: none"> <li>• dukungan untuk lembaga publik serta pengembangan dan tata kelola konsesi</li> <li>• bantuan teknis</li> <li>• dukungan untuk lembaga tingkat sekunder</li> </ul>	Investasi moderat (dimulai pada 1980-an) bergantung pada pemerintah dan organisasi parastatal <ul style="list-style-type: none"> <li>• pengembangan lembaga/ penguatan tata kelola dan kapasitas pengelolaan</li> <li>• bantuan teknis</li> <li>• bantuan sertifikasi (disalurkan melalui LSM)</li> </ul>	Investasi finansial substansial sejak 1980-an <ul style="list-style-type: none"> <li>• pelatihan teknis</li> <li>• peningkatan tata kelola dan kapasitas pengelolaan hutan</li> <li>• pembangunan infrastruktur</li> </ul>	Investasi finansial substansial sejak awal 1990-an <ul style="list-style-type: none"> <li>• bantuan teknis</li> <li>• peningkatan kapasitas untuk mengatur dan mengelola lembaga konservasi satwa liar</li> <li>• penyediaan modal awal bagi lembaga-lembaga konservasi</li> </ul>

dilanjutkan ke halaman berikutnya

Tabel 1. (lanjutan)

	Guatemala	Meksiko	Nepal	Namibia
<b>Sektor publik</b>	<p>Investasi keuangan minor; kebanyakan dana negara bersumber dari donor dan bank pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tata kelola hutan dan peningkatan kapasitas pengelolaan lembaga publik</li> <li>implementasi kebijakan</li> <li>penegakan hukum</li> </ul>	<p>Investasi finansial signifikan; jumlah yang substansial dari donor/ bank pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam kemitraan parastatal (1960-an)</li> <li>investasi parastatal dalam pembangunan lembaga (ejidos dan gabungan ejidos), infrastruktur, dan modal manusia (1970-an)</li> <li>pengembangan CFE (1990-an)</li> <li>pengelolaan dan konservasi (1990-an /2000-an)</li> </ul>	<p>Investasi finansial substansial namun kebanyakan bersumber dari donor/bank pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pelatihan teknis</li> <li>peningkatan kapasitas CFI terkait tata kelola hutan dan pengelolaan hutan</li> <li>pembangunan infrastruktur</li> </ul>	<p>Investasi finansial substansial, namun kebanyakan bersumber dari donor/bank pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>penyusunan kebijakan</li> <li>pemetaan dan perijinan lembaga konservasi</li> <li>perusahaan tentang aturan-aturan baru</li> <li>pelatihan</li> <li>perencanaan jangka staf dan kendaraan</li> </ul>
<b>Lembaga Hutan Kemasyarakatan</b>	<p>Investasi finansial substansial (relatif terhadap pemasukan) sejalan dengan peningkatan kompetensi sejumlah konsesi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>peningkatan kapasitas untuk mengelola konsesi</li> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>peningkatan rantai nilai</li> <li>penguatan hak-hak</li> <li>perlindungan kebakaran</li> <li>pekerjaan untuk anggota konsesi dan rumah tangga lain</li> <li>kesehatan dan pendidikan Lembaga tingkat sekunder (Asosiasi Hutan Kemasyarakatan Petén/ACOFOP) dan Perseroan Terbatas Jasa Hutan (FORESCOM) adalah kunci untuk memperoleh tambahan pendanaan/ memperluas pengaruh</li> </ul>	<p>Investasi finansial substansial (relatif terhadap pemasukan) sejalan dengan peningkatan kompetensi CFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>peningkatan rantai nilai/ peralatan dan fasilitas</li> <li>peningkatan hutan/konservasi</li> <li>pekerjaan untuk anggota masyarakat</li> <li>infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan</li> </ul> <p>Banyaknya perkumpulan usaha patungan lembaga sekunder (gabungan ejidos, asosiasi usaha patungan) antara masyarakat membentuk investasi finansial dalam pengembangan perusahaan dan barang publik</p>	<p>Investasi finansial substansial (relatif terhadap pemasukan) sejalan dengan peningkatan kompetensi CFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pekerjaan untuk anggota</li> <li>perusahaan berbasis hutan</li> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>perlindungan hutan/ peningkatan</li> <li>jalan, air, pendidikan, pelayanan kesehatan Federasi Pengguna Hutan Kemasyarakatan (FECOFUN) memainkan peran kunci dalam memperkuat hak penggunaan masyarakat dan membangun kapasitas CFE</li> </ul>	<p>Investasi finansial substansial (relatif terhadap pemasukan) sejalan dengan peningkatan kompetensi CFI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>penciptaan pekerjaan</li> <li>ekoturisme dan perusahaan perburuan konservasi</li> <li>infrastruktur</li> <li>pendidikan/pelayanan kesehatan</li> <li>rencana pengelolaan perlindungan satwa liar</li> </ul> <p>Ketiadaan asosiasi lembaga konservasi tingkat nasional; asosiasi lembaga konservasi regional adalah anggota dari Asosiasi untuk Organisasi Pendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Namibia (NACSO)</p>
<b>Sektor swasta</b>	<p>Investasi finansial masih terbatas sejauh ini, namun kemitraan antara bank pembangunan dan bank komersial yang menyediakan kredit bagi perusahaan hutan mulai bermunculan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan pembalakan yang disubsidi publik – kemitraan masyarakat yang diawali sejak 1960-an berinvestasi dalam kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemitraan.</li> <li>Investasi parastatal pada infrastruktur dan modal manusia pada 1970-an memberikan landasan bagi perusahaan hutan kemasyarakatan untuk berkembang</li> <li>Aliansi masyarakat – pembeli adalah hal yang umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan terbatas dari pihak eksternal sektor swasta</li> <li>Perusahaan hutan berskala kecil dan medium telah mulai berinvestasi dalam pemrosesan kayu, kegiatan pariwisata, pemrosesan dan pemasaran HHBK</li> <li>Suatu program pendanaan bauran yang melibatkan beberapa bank pembangunan, pemerintah Nepal dan masyarakat telah muncul baru-baru ini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan sektor swasta yang kuat. Terdapat banyak kesepakatan usaha patungan antara lembaga konservasi dengan operator dari sektor swasta</li> <li>Sebuah sumber pendapatan alternatif yang baru muncul adalah suatu aliran Kredit dan Insentif Satwa Liar, yang mengaitkan performa lembaga konservasi dengan investasi</li> </ul>
<b>LSM</b>	<p>Donor biasanya menyalurkan bantuan kepada CFI melalui LSM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>keterampilan pengelolaan hutan</li> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC)</li> <li>pelatihan pengelolaan bisnis</li> <li>peningkatan rantai nilai (hasil hutan kayu dan bukan kayu (HHBK))</li> <li>advokasi reformasi kebijakan</li> </ul>	<p>Donor biasanya menyalurkan bantuan kepada CFI melalui LSM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>keterampilan pengelolaan hutan</li> <li>sertifikasi FSC</li> <li>pelatihan pengelolaan bisnis</li> <li>peningkatan rantai nilai</li> <li>advokasi reformasi kebijakan</li> </ul>	<p>Donor biasanya menyalurkan bantuan kepada CFI melalui LSM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>rencana pengelolaan hutan</li> <li>keterampilan pengelolaan hutan</li> <li>sertifikasi FSC untuk HHBK</li> <li>pelatihan keterampilan keuangan/pengelolaan bisnis</li> <li>peningkatan rantai nilai HHBK</li> <li>advokasi reformasi kebijakan</li> </ul>	<p>Konsorsium LSM lokal dan internasional membentuk Asosiasi untuk Organisasi Pendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Namibia (NACSO)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bantuan hukum untuk pendaftaran lembaga konservasi dan kesepakatan usaha patungan</li> <li>sistem asuransi untuk pemantauan satwa liar/ kerusakan satwa liar</li> <li>pelatihan keterampilan keuangan dan administratif</li> <li>pengembangan rantai nilai produk-produk yang berasal dari hutan (veld)</li> </ul>

## Pembahasan

**Proposisi 1 – Penghalang untuk investasi milik bersama tetap dapat diatasi dan investasi pada sumber daya milik masyarakat telah terjadi. Investasi eksternal utamanya diperoleh dari donor dan pemerintah, namun investasi sektor swasta semakin meningkat.**

- **Donor, termasuk penyedia bantuan pembangunan resmi (ODA) dan lembaga pendanaan pembangunan (DFI), terlihat sebagai investor yang paling signifikan** dalam sumber daya yang dimiliki masyarakat.
- **Terdapat dukungan yang bervariasi terhadap sektor publik domestik.** Investasi pemerintah yang kuat dijumpai di Meksiko, Namibia dan Nepal, namun relatif lemah di Guatemala. Di Namibia dan Nepal, investasi pemerintah dalam porsi yang besar didapatkan dari sejumlah lembaga donor.
- **Terbatasnya investasi swasta terjadi pada keempat kasus yang diteliti, dengan bentuk jaminan dan kepastian yang berbeda-beda.** Usaha patungan (joint venture) banyak dijumpai di Namibia dan Meksiko. Pendanaan bauran, yaitu ketika suatu bank pembangunan atau donor dapat menerima beberapa risiko kerugian pertama dari suatu pinjaman, semakin banyak digunakan di Nepal dan Guatemala.

**Proposisi 2 – Kesiapan investasi mempersyaratkan adanya jaminan dan kepastian bagi investor prospektif dan penerima investasi bahwa kewajiban masing-masing pihak akan dipenuhi. Setiap sektor memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk memitigasi risiko. Kesiapan investasi berkembang sepanjang waktu dan secara bertahap seiring dengan meningkatnya jaminan dan kepastian.**

- **Investasi donor dan pemerintah sangat penting dalam membangun kapasitas CFI sejak awal** pada hal-hal seperti tata kelola, literasi keuangan, administrasi, pengembangan rencana bisnis dan pengelolaan hutan.
- **Seringnya donor menyalurkan dana melalui LSM atau konsultan** untuk membangun kapasitas, menjadi perantara kesepakatan antara investor dan masyarakat, serta memberikan jaminan dan kepastian kepada para investor bahwa mereka akan memperoleh hasil yang diharapkan.
- **Terbentuknya kemitraan baru berperan penting dalam munculnya CFI yang layak secara finansial.** Bantuan dari LSM telah mendukung CFI dalam mendapatkan sertifikasi *Forest Stewardship Council* (FSC) untuk kayu di Guatemala dan Meksiko, serta untuk HHBK di Nepal. Di Namibia, mitra sektor swasta telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan sehingga memungkinkan sejumlah lembaga konservasi untuk mencapai standar internasional bagi perhotelan dan pariwisata.
- **Berbagai perkumpulan pada tingkat nasional telah memainkan peran kunci dalam memunculkan CFI yang layak secara finansial.** Melalui organisasi tingkat sekunder, CFI telah berhasil mengadvokasi reformasi kebijakan yang memperbaiki kondisi-kondisi pemungkin bagi perusahaan berbasis masyarakat.
- **Praktik-praktik baru terkait mekanisme pendanaan sedang diujicobakan dan dilembagakan.**
  - Asosiasi untuk Organisasi Pendukung Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Namibia (NACSO) telah membentuk suatu dana konservasi untuk menarik dana dari berbagai sumber dan menyalurkannya kepada lembaga-lembaga konservasi.



Gambar 2. Fase-fase investasi dalam CFI

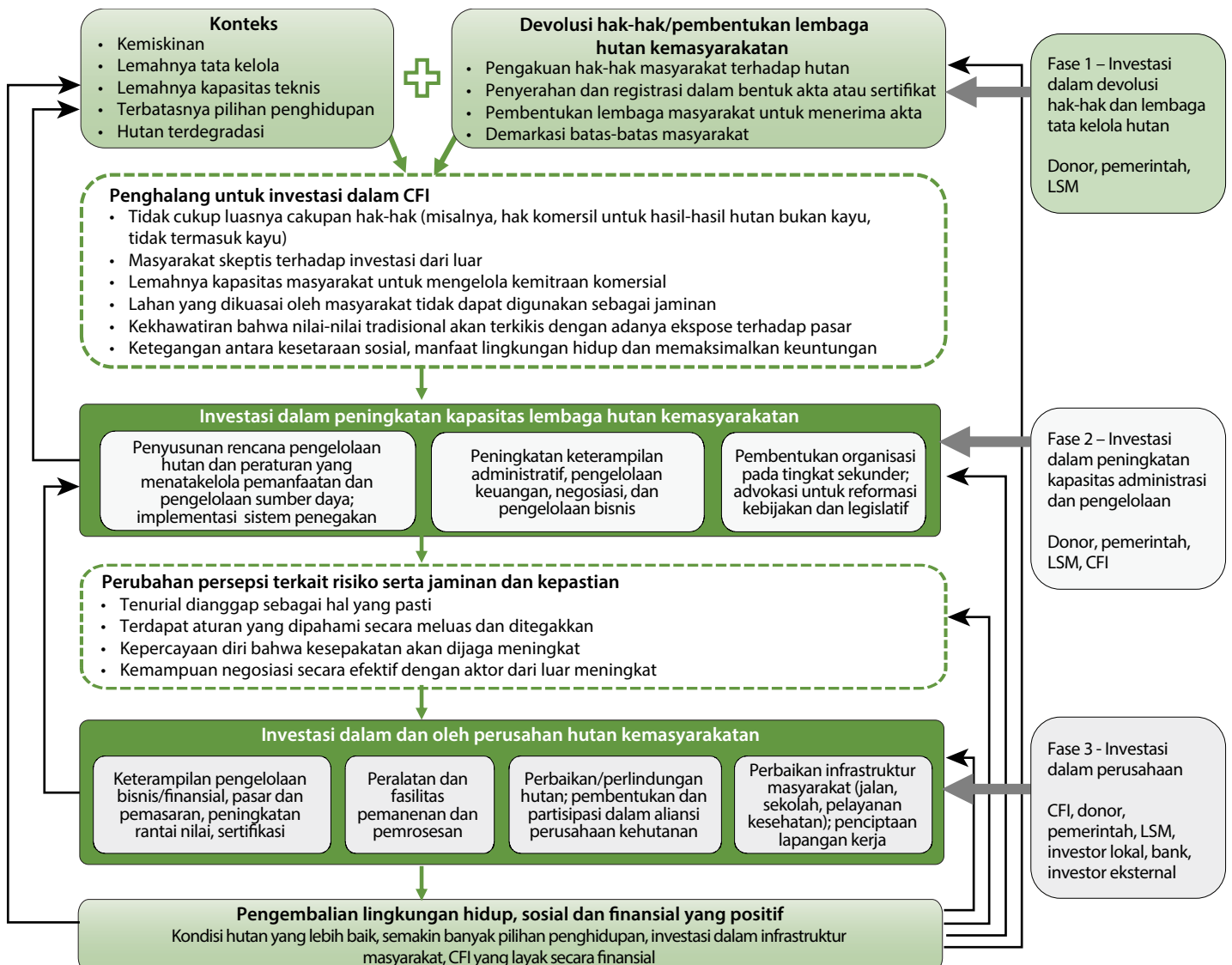
- Di Meksiko, beberapa CFI telah mengembangkan perkumpulan antar masyarakat yang inovatif, yang memungkinkan mereka mencapai skala ekonomi yang diinginkan.
- Konsesi hutan Guatemala sedang bereksperimen dengan mekanisme pendanaan bauran yang melibatkan kombinasi pendanaan multilateral dan kredit bank.
- Di Nepal, beberapa CFI telah mengembangkan mekanisme pendanaan mandiri seperti iuran keanggotaan bertingkat untuk menutupi biaya pelatihan dan peralatan.

Temuan kami sesuai dengan proposisi Klavánková et al (2018) bahwa perusahaan hutan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem inovasi sosial dinamis yang lebih luas.

Sistem inovasi sosial ini didorong oleh devolusi hak-hak kepada masyarakat dan memerlukan perubahan sejalan dengan berkembangnya sistem (Gambar 2). Gambar 3 menunjukkan diagram TOC yang telah diperbaiki, yang menunjukkan kebertahanan sistem inovasi sosial.

**Proposisi 3 – Hak-hak masyarakat telah mendorong investasi yang mengakui karakter sosial kepemilikan bersama dan mewujudkan pengembalian lingkungan hidup dan sosial, serta keuntungan.**

- **CFI menekankan pada penciptaan peluang kerja bahkan jika harus menyebabkan kehilangan daya saing finansial.** Mereka lebih memilih untuk menyediakan pekerjaan paruh waktu bagi semua anggota masyarakat yang ingin bekerja dibandingkan dengan menawarkan pekerjaan penuh waktu (*full time*) pada beberapa orang saja.
- **CFI telah menjalankan beberapa fungsi pemerintah,** khususnya dalam menyediakan barang-barang publik seperti jalan, sekolah, dan klinik kesehatan.
- **CFI biasanya melakukan investasi yang bertujuan untuk memperbaiki produktivitas hutan (atau satwa liar),** investasi yang cenderung menghasilkan keluaran-keluaran lingkungan hidup yang positif.



Gambar 3. Teori perubahan yang diadaptasikan menghubungkan devolusi hak-hak, investasi dan keluaran.

## Kesimpulan

Kami mencatat tiga fitur kunci dari beberapa kasus yang dapat menginformasikan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mendukung investasi CFI.

- **Sumber-sumber investasi finansial yang berbeda akan masuk pada saat yang berbeda.** Sektor publik dan investasi donor sangat penting pada tahap pertama ketika risiko terhadap investor paling tinggi. Ini berlanjut pada fase dua, ketika risiko dan biaya transaksi, walaupun menurun, tetap tinggi. Investasi finansial sektor swasta masuk pada fase tiga, yaitu ketika risiko dan biaya transaksi menurun.
- **Jenis-jenis investasi membutuhkan perubahan sejalan dengan bergesernya sistem inovasi sosial ke fase yang baru.** Investasi pemungkin awalnya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sosial yang dibutuhkan masyarakat untuk mengaktualisasikan hak-hak mereka. Selama fase dua, investasi pemungkin tetap penting namun investasi aset mulai menjadi signifikan karena ini meningkatkan kemungkinan CFI untuk menghasilkan produk yang memadai dengan kualitas sesuai yang diharapkan. Pada fase tiga, investasi aset mulai mendominasi.
- **Evolusi investasi dalam CFI adalah berulang.** Keluaran dari investasi pemungkin awal mengubah konteks dan mengkatalisasi kebutuhan untuk investasi aset, juga investasi pemungkin tambahan lainnya. Melalui suatu proses pembelajaran dan adaptasi yang terus-menerus, CFI membangun kepercayaan diri para anggotanya dan investor eksternal bahwa mereka dapat mencapai keuntungan finansial yang memadai.

Masyarakat, pemerintah dan sektor swasta harus dipandang oleh semua pihak sebagai mitra yang setara dalam sistem inovasi sosial yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang mendukung perusahaan sosial berbasis masyarakat, melayani berbagai tujuan terkait lingkungan hidup, sosial dan ekonomi. Pemahaman bersama tentang karakter sistemik dari proses-proses inovasi tidak selalu dapat diterima dengan mudah, dan beberapa pihak, khususnya pemerintah dan sektor swasta, tidak memahami bahwa perubahan permanen yang mendasar dalam beberapa kebijakan dan praktik-praktik mereka juga dibutuhkan. Berbagai instansi kehutanan perlu menengok kembali fungsi-fungsi penegakan dalam pemanfaatan hutan mereka dan berinvestasi lebih banyak dalam melindungi hak-hak masyarakat dan membangun kapasitas organisasi lokal.

Bisnis swasta sebaiknya bersedia untuk mengakomodasi tujuan-tujuan CFI terkait kesejahteraan sosial dan penciptaan lapangan kerja. Dibutuhkan penelitian tambahan mengenai sumber-sumber, mekanisme, volume dan arahan bagi investasi dalam sumber daya yang dikelola masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan ruang aksi untuk inovasi sosial. Mengingat terus berubahnya modal yang dibutuhkan

oleh CFI seiring perkembangannya, kami berargumen bahwa penting untuk memfokuskan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait opsi-opsi pendanaan mereka dan potensi investasi pada tahap-tahap yang berbeda dalam perkembangannya.

## Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didukung oleh pendanaan dari Program Penelitian CGIAR tentang Kebijakan, Institusi dan Pasar (PIM) yang dipimpin oleh Institut Internasional untuk Penelitian Kebijakan Pangan (IFPRI) dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

*Info brief* ini disusun dari makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Bank Dunia tahun 2018 Lahan dan Kemiskinan: Tata Kelola Lahan dalam Dunia yang Saling Terhubung, Washington D.C. 19–23 Maret 2018. 07-07: Hak Masyarakat untuk Manfaat Lingkungan Hidup oleh Lawry S, Gynch S, Monterroso I dan Adhikary A. 2018. Manfaat bersama: Bagaimana tenurial masyarakat memfasilitasi investasi bersama untuk pertumbuhan yang inklusif.

## Pustaka

- Ambrose-Oji B, Lawrence A dan Stewart A. 2015. Community based forest enterprises in Britain: two organizing typologies. *Forest Policy and Economics* 58:65–74.
- Baynes J, Herbohn J, Smith C, Fisher R dan Braye D. 2015. Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *Global Environmental Change* 35:226–238.
- Bhandari PKC, Bhusal P, Paudel G, Upadhyaya CP dan Chhetri BBK. 2019. Importance of community forestry funds for rural development in Nepal. *Resources* 8(2):85. doi:10.3390/resources8020085
- Bray D dan Merino L. 2002. *The rise of community forestry in Mexico: History, concepts, and lessons learned from twenty years of community timber production (p. 133)*. Project Report. Mexico, D.F.: Ford Foundation.
- Carrillo-Anzures M, Flores E, Torres Rojo J, Sangerman-Jarquín D, González L dan Buendía E. 2017. Characterization of forest producers in 12 states of the Mexican Republic. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas* 8(7):1561–73.
- Cronkleton P, Bray DB dan Medina G. 2011. Community forest management and the emergence of multi-scale governance institutions: lessons for REDD+ development from Mexico, Brazil and Bolivia. *Forests* 2:451–73.
- Dasgupta P. 2005. Common property resources: Economic analytics. *Economic and Political Weekly* 40(16):1610–1622.
- Elson D. 2012. *Guide to investing in locally controlled forestry*. Growing forest partnerships in association with FAO, IIED, IUCN, The Forests Dialogue and the World Bank. London, UK: International Institute for Environment and Development.
- Fellnhöfer K. 2015. Literature review: investment readiness level of small and medium sized companies. *International Journal of Managerial and Financial Accounting* 7(3/4): 268–84.

Foundjem-Tita D, Duguma LA, Speelman S dan Piabuo SM. 2018. Viability of community forests as social enterprises: a Cameroon case study. *Ecology and Society* 23(4):50. doi.org/10.5751/ES-10651-230450

Hewitt D dan Castro Delgado M. 2009. *Key factors for successful community-corporate partnerships – results of a comparative analysis among Latin American cases*. Richmond, Vermont, Amerika Serikat: Rainforest Alliance.

Klůvanková T, Brnkaláková S, Špaček M, Slee B, Nijnik M, Valero D, Miller D, Bryce R, Kozova M, Polman N, Szabo T dan Gežík V. 2018. Understanding social innovation for the wellbeing of forest-dependent communities: A preliminary theoretical framework. *Forest Policy and Economics* 97:163–74.

Lawry S, Samii C, Hall R, Leopold A, Hornby D dan Mtero F. 2017. The impact of land property rights interventions on investment and agricultural productivity in developing countries: a systematic review. *Journal of Development Effectiveness* 9(1):61–81.

Mason C dan Kwok J. 2010. Investment readiness programmes and access to finance: a critical review of design issues. *Local Economy* 25(4):269–92.

[MET/NACSO] Ministry of Environment and Tourism/Namibian Association of CBNRM Support Organisations. 2018. *The state*

*of community conservation in Namibia – a review of communal conservancies, community forests and other CBNRM activities (Annual Report 2017)*. Windhoek, Namibia: MET/NACSO.

Naidoo R, Weaver C, Diggle RW, Greenwell M, Stuart-Hill G dan Thouless C. 2016. Complementary benefits of tourism and hunting to communal conservancies in Namibia. *Conservation Biology* 30(3):628–38.

Paudel NS, Monterroso I dan Cronkleton P. 2012. Secondary level organisations and the democratisation of forest governance: Case studies from Nepal and Guatemala. *Conservation and Society* 10(2):124–135.

Polman N, Slee W, Klůvanková T, Dijkshoorn M, Nijnik M, Gežík V dan Soma K. 2017. Classification of Social Innovations for Marginalized Rural Areas, Deliverable 2.1, Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA). Brussels, Belgium: European Union Framework Programme Horizon 2020. pp. 32.

Radachowsky J, Ramos VH, McNab R, Baur EH dan Kazakov N. 2012. Forest concessions in the Maya Biosphere Reserve, Guatemala: A decade later. *Forest Ecology and Management* 268:18–28.

Wily LA. 2018. Collective land ownership in the 21st century: Overview of global trends. *Land* 7(2):68, <https://doi.org/10.3390/land7020068>

**Kontak:** Steven Lawry (s.lawry@cgiar.org)



RESEARCH  
PROGRAM ON  
Policies,  
Institutions,  
and Markets  
Led by IFPRI

Program Penelitian CGIAR mengenai Kebijakan, Kelembagaan dan Pasar (PIM) telah memimpin penelitian berorientasi-aksi dalam melengkapi para pengambil keputusan dengan bukti yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan pangan dan pertanian yang memberikan pelayanan lebih pada kepentingan produsen dan konsumen miskin, baik laki-laki maupun perempuan. PIM menggabungkan sumber daya dari pusat CGIAR dan banyak mitra internasional, regional, dan nasional. Program ini dipimpin oleh Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). [www.pim.cgiar.org](http://www.pim.cgiar.org)

[cifor.org](http://cifor.org)

[forestsnews.cifor.org](http://forestsnews.cifor.org)



#### Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)

CIFOR meningkatkan kesejahteraan manusia, kesetaraan dan integritas lingkungan dengan melakukan penelitian inovatif, mengembangkan kapasitas para mitra dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan untuk memberi masukan terhadap berbagai kebijakan dan praktik yang memengaruhi hutan dan masyarakat. CIFOR merupakan bagian dari Pusat Penelitian CGIAR, dan memimpin Program Penelitian CGIAR pada Hutan, Pohon dan Wanatani (FTA). Kantor pusat kami berada di Bogor, Indonesia, dengan kantor wilayah di Nairobi, Kenya; Yaounde, Kamerun; Lima, Peru dan Bonn, Jerman.

